

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan PSAK 30 dan PSAK 73

2.1.1 Definisi Sewa

Berdasarkan PSAK 30 definisi sewa adalah perjanjian yang mengharuskan lessor memberikan hak untuk menggunakan aset dengan periode waktu sesuai kesepakatan kepada *lessee*. Berbeda dengan PSAK 30, menurut PSAK 73 paragraf 9, sewa diakui dalam suatu kontrak, jika dalam kontrak tersebut terdapat hak pengendalian untuk menggunakan atau memanfaatkan aset identifikasian dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat perbedaan antara PSAK 30 dan PSAK 73, dimana dalam PSAK 73 aset sewa lebih diatur spesifik dengan menentukan apakah aset tersebut aset identifikasian atau tidak. Bascom *et al.* (2017) menyatakan bahwa agar suatu sewa dapat diakui maka harus ada aset identifikasian . Terdapat beberapa tahap dalam menentukan aset identifikasian. Pertama, aset spesifik mengandung arti aset tersebut secara eksplisit tertera dalam kontrak atau secara implisit tersedia ketika digunakan oleh *lessee*. Kedua, bagian kapasitas aset dapat dibedakan secara fisik. Ketiga, pemasok atau *supplier* tidak mempunyai hak substantif untuk menggantikan aset dengan aset alternatif lain selama periode penggunaan.

Jika suatu kontrak memenuhi semua tiga kriteria tahapan tersebut, maka kontrak terdapat aset identifikasian.

PSAK 73 mengatur pengecualian penerapan sewa pembiayaan untuk beberapa sewa terkait sebagai berikut.

- a. Sewa untuk kepentingan eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam lain sejenis yang tidak dapat diperbarui.
- b. Sewa aset biologis sebagaimana PSAK 69 : Agrikultur yang dimiliki penyewa.
- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa.
- d. Lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh lessor dalam ruang lingkup PSAK 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
- e. Hak *lessee* dalam perjanjian lisensi di dalam ruang lingkup PSAK 19: Aset Tak Berwujud untuk beberapa item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta.

2.1.2 Klasifikasi Sewa

Menurut PSAK 30 sewa diklasifikasikan menjadi dua yaitu sewa pembiayaan (*finance lease*) dan sewa operasi (*operating lease*). Klasifikasi tersebut didasarkan pada risiko dan manfaat aset sewaan dimiliki oleh *lessor* atau *lessee*. Risiko yang dimaksud adalah segala potensi kerugian dari kapasitas yang tidak dimanfaatkan atau keusangan pada teknologi dan keberagaman tingkat pengembalian karena keadaan ekonomi. Manfaat aset sewaan dapat dinilai dari ekspektasi lamanya umur aset dapat digunakan dalam operasi sepanjang umur ekonomis aset serta keuntungan dari kenaikan realisasi nilai residu. Jika risiko dan manfaat kepemilikan aset dalam sewa beralih, maka sewa diklasifikasikan sebagai

sewa pembiayaan. Namun, sewa akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan aset secara substansial.

Dalam PSAK 73, hampir semua sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, kecuali sewa jangka pendek atau sewa dengan aset pendasar yang nilainya rendah maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sewa pembiayaan mengharuskan *lessee* untuk mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal awal sewa. Jika sewa merupakan sewa operasi, maka *lessee* mengakui adanya beban dari pembayaran sewa yang disusutkan dengan garis lurus atau metode lain sepanjang masa sewa.

2.1.3 Prosedur Transisi PSAK 30 ke PSAK 73

PSAK 73 menggantikan PSAK 30 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Namun, entitas dapat melakukan penerapan dini jika entitas sudah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 73.

Berdasarkan lampiran C draf eksposur PSAK 73 dijelaskan bahwa dalam masa penerapan awal PSAK 73 penyewa dapat menerapkan dua pendekatan yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Restropektif (*Full Restropective Approach*)

Cara ini mengharuskan penyewa untuk menyajikan kembali informasi komparatif dari periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sesuai PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Pendekatan ini sulit diterapkan bagi entitas yang

memiliki volume sewa yang tinggi karena diperlukan informasi historis dan perhitungan. Entitas diharuskan menghitung ulang semua sewa dari tanggal penerapan awal sampai tahun 2018 (untuk laporan komparatif) dan 2019 (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018).

2. Pendekatan Restropektif Modifikasi (*Modified Restropective Approach*)

Lessee yang memilih pendekatan ini, tidak menyajikan kembali informasi komparatif, tetapi harus mengakui dampak kumulatif penerapan awal PSAK 73 sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba (atau komponen ekuitas lain) pada tanggal penerapan awal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Pada tabel II-1 dijelaskan perbedaan ketentuan pengukuran berdasarkan jenis sewanya.

Tabel II.1 Pengukuran pada Masa Transisi

Pengukuran	Sewa Sebelumnya Diklasifikasikan sebagai Sewa Operasi	Sewa Sebelumnya Diklasifikasikan Sebagai Sewa Pembiayaan
Aset Hak Guna	Penyewa dapat memilih antara: 1. nilai tercatat sejak awal yang didiskonto dengan <i>incremental borrowing rate</i> 2. liabilitas sewa yang disesuaikan dengan nilai sewa dibayar dimuka atau nilai sewa yang terutang	Nilai tercatat aset sewa segera sebelum tanggal yang diukur dengan PSAK 30: Sewa
Liabilitas Sewa	Present value dari pembayaran sewa yang belum dibayar lalu didiskonto dengan <i>incremental borrowing rate lessee</i> pada tanggal penerapan awal	Nilai tercatat liabilitas sewa segera sebelum tanggal yang diukur dengan PSAK 30: Sewa

Sumber: diolah dari Draf Eksposur PSAK 73 Sewa, 2017

Selain itu, berdasarkan Draf Eksposur PSAK 73 lampiran C *lessee* juga diberikan cara praktis ketika menerapkan pendekatan restropektif modifikasian untuk sewa yang sebelumnya masuk klasifikasi sewa operasi, diantaranya *lessee* dapat diperkenankan sebagai berikut.

- a. Memakai tingkat diskonto tunggal untuk sewa yang memiliki karakteristik serupa.
- b. Menyesuaikan aset hak guna dengan jumlah provisi sewa yang memberatkan sesuai PSAK 57: Provisi, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi yang segera diakui di laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal.
- c. Memilih tidak menilai aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang mempunyai jangka waktu kurang dari sama dengan dua belas bulan terhitung dari tanggal penerapan awal. Tetapi *lessee* harus mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek dan memperhitungkan biaya berkaitan sewa.
- d. Tidak memasukkan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.
- e. Memakai *hindsight*, misalnya penentuan adanya hak opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

2.2 Akuntansi Sewa oleh Lessee

2.2.1 Pengakuan Sewa

Berdasarkan PSAK 30, *lessee* harus melakukan pengakuan aset dan liabilitas terkait sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan. Lain halnya dengan PSAK 73 yang mengharuskan *lessee* untuk mengakui adanya aset-hak guna dan liabilitas sewa yang timbul.

2.2.2 Pengukuran Sewa

2.2.2.1 Pengukuran Awal Sewa

Dalam PSAK 30 dijelaskan terkait pengukuran sewa pembiayaan dimana lessee harus mengukur aset sewa sebesar nilai wajarnya. Kemudian, liabilitas sewa diukur sebesar present value pembayaran sewa minimum. Jika pada saat pengukuran awal terdapat biaya langsung yang berhubungan dengan sewa dan biaya sewa tersebut dapat diatribusikan secara langsung, maka biaya ini ditambahkan sebagai jumlah aset.

Sementara itu, berdasarkan PSAK 73 pada tanggal permulaan, *lessee* akan melakukan pengukuran aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengukuran aset hak-guna dilakukan sesuai dengan biaya perolehannya yang meliputi:

- a. jumlah awal liabilitas sewa,
- b. pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif jika ada,
- c. biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee*,
- d. perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan *lessee* meliputi pembongkaran dan pemindahan aset pendasar, restorasi tempat aset berada atau restorasi aset pendasar ke keadaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sewa dalam hal biaya tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan persediaan.

Selain itu, pada tanggal permulaan *lessee* juga mengukur liabilitas sewa. PSAK menjelaskan bahwa pengukuran sewa didasarkan pada *present value* pembayaran sewa minimum menggunakan tingkat diskonto suku bunga implisit sewa atau *incremental borrowing rate lessee*.

Pengukuran liabilitas sewa berdasarkan PSAK 73 hampir sama dengan PSAK 30. Perbedaannya terdapat pada komponen pembayaran sewa yang dimasukkan ketika mengukur liabilitas sewa. Pembayaran sewa tersebut diatur dalam PSAK 73 sebagai berikut:

- a. pembayaran tetap dikurangi jumlah piutang insentif sewa,
- b. pembayaran sewa variabel yang tergantung pada suku bunga pada tanggal permulaan,
- c. estimasi jumlah yang dibayarkan *lessee* sebagai jaminan nilai residual,
- d. jumlah hak opsi yang cukup pasti akan dieksekusi,
- e. pembayaran penalti akibat dihentikannya sewa, jika masa sewa menggambarkan *lessee* untuk mengeksekusi opsi tersebut.

2.2.2.2 Pengukuran Selanjutnya Sewa

PSAK 73 paragraf 29 mengatur bahwa setelah tanggal permulaan *lessee* menggunakan model biaya pada pengukuran aset hak-guna. Model biaya mengharuskan pengukuran aset hak guna sesuai dengan biaya perolehannya kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan hasil revaluasi liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.

Berdasarkan paragraf 32 PSAK 72, penyusutan aset hak guna dilakukan sesuai umur manfaat aset hak guna dalam hal terdapat perpindahan kepemilikan aset kepada *lessee* atau terdapat opsi beli oleh *lessee*. Namun, jika tidak ada perpindahan kepemilikan maupun opsi beli, maka periode penyusutan aset hak-guna dilakukan yang lebih pendek antara umur manfaat aset dan periode sewa.

Selain itu, *lessee* juga menentukan penurunan nilai serta mencatat kerugian aset hak-guna sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

Selain dengan model biaya, PSAK 73 memberikan alternatif lain untuk mengukur aset hak-guna yaitu sebagai berikut.

d. Model Nilai Wajar

Aset hak guna diukur berdasarkan nilai wajar jika memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi.

e. Model Revaluasi

Jika aset hak guna berkaitan dengan kelas aset tetap yang pengukurannya menggunakan model revaluasi, maka aset hak-guna dari aset tersebut akan direvaluasi sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap.

Sementara itu, pengukuran selanjutnya liabilitas sewa dilakukan dengan cara:

- a. penambahan jumlah tercatat karena adanya bunga dari liabilitas sewa,
- b. pengurangan jumlah tercatat karena sewa yang telah dibayar,
- c. pengukuran kembali jumlah tercatat untuk mencerminkan adanya penilaian kembali atau modifikasi sewa atau pembayaran sewa tetap secara-substansi revisian.

Bunga setiap periode selama masa sewa adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik tetap atas sisa saldo liabilitas sewa. Suku bunga periodik berasal dari tingkat diskonto implisit sewa atau tingkat diskonto inkremental *lessee* atau tingkat diskonto revisian.

2.2.3 Penyajian Sewa

Penyajian sewa pembiayaan oleh *lessee* terdapat pada empat laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta laporan arus kas.

Penyajian dalam laporan posisi keuangan dijelaskan pada PSAK 73 paragraf 47 dimana *lessee* harus menyajikan atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas sewa pembiayaan yang dilakukan. Hal-hal yang perlu disajikan atau diungkapkan adalah.

a. Aset hak guna

Lessee dapat memilih untuk menyajikan aset hak-guna secara terpisah atau tidak. Jika aset hak guna disajikan tidak terpisah dari aset lainnya, maka *lessee* harus melakukan dua penyajian dan pengungkapan yang tepat. Penyajian aset hak-guna dimasukkan satu pos dengan aset pendasar yang mirip jika aset tersebut dimiliki. Pengungkapan dilakukan pada pos laporan posisi keuangan terkait aset hak-guna.

b. Liabilitas sewa

Penyajian liabilitas sewa terpisah dengan liabilitas lain. Namun, jika *lessee* tidak memisahkan penyajian liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan, maka *lessee* harus melakukan pengungkapan letak pos mana yang terkait dengan liabilitas tersebut dalam laporan posisi keuangan.

Pada laporan laba rugi dan komprehensif lain berdasarkan PSAK 73 paragraf 49, *lessee* menyajikan secara terpisah antara beban bunga dari liabilitas sewa dan beban depresiasi dari aset hak-guna. Berdasarkan PSAK 1: Penyajian

Laporan Keuangan paragraf 82(b) mensyaratkan beban bunga liabilitas sewa yang merupakan komponen biaya keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Terakhir, sewa pembiayaan disajikan pada laporan arus kas. Berdasarkan PSAK 73 paragraf 50 *lessee* melakukan klasifikasi terkait:

- a. pembayaran pokok liabilitas sewa secara kas sebagai aktivitas pendanaan,
- b. pembayaran bunga liabilitas sewa secara kas menerapkan persyaratan yang diatur dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas untuk pembayaran bunga,
- c. pembayaran sewa jangka pendek, sewa aset bernilai rendah, dan sewa variabel yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sebagai aktivitas operasi.

2.2.4 Pengungkapan Sewa

Berdasarkan PSAK 73 paragraf 51, pengungkapan sewa bertujuan agar *lessee* mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas sehingga dapat dijadikan dasar oleh pengguna laporan keuangan dalam menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas *lessee*. Informasi sewa diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau laporan keuangan secara terpisah. Jika informasi sewa sudah termuat pada referensi silang catatan atas laporan keuangan, maka *lessee* tidak perlu mengungkapkan kembali informasi yang sudah disajikan di bagian lain laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 73 paragraf 53 hal-hal yang perlu diungkapkan untuk setiap periode pelaporannya adalah sebagai berikut:

- a. beban depresiasi aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar,

- b. beban bunga dari liabilitas sewa,
- c. beban sewa jangka pendek dengan masa sewa 1 bulan atau kurang,
- d. beban sewa aset yang bernilai rendah,
- e. beban terkait pembayaran sewa variabel yang tidak masuk dalam pengukuran sewa,
- f. pendapatan dari menyewakan sebagian aset hak-guna,
- g. total kas yang dikeluarkan untuk sewa,
- h. penambahan aset hak-guna,
- i. keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan sewa balik,
- j. jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasar kelas aset pendasar.

Pengungkapan jumlah diatas disajikan dalam format tabel, format lain diperbolehkan jika ada yang lebih tepat. Jumlah yang diungkapkan adalah biaya yang sudah *lessee* masukkan sebagai aset lain selama periode pelaporan.

Selain itu, PSAK 73 paragraf 59 memberikan tambahan pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif aktivitas sewa meliputi:

- a. sifat aktivitas sewa *lessee*,
- b. pengeluaran kas masa depan yang mungkin berdampak terhadap *lessee* dan tidak terefleksi dalam pengukuran liabilitas sewa. Hal ini juga mencakup dampak yang ditimbulkan dari pembayaran sewa variabel, opsi perpanjangan dan opsi penghentian, jaminan nilai residual, serta sewa yang belum dimulai oleh *lessee* namun sudah berkomitmen,
- c. pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa,

d. transaksi jual dan sewa balik.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas bisnis pada tanggal yang spesifik (Kieso *et al.*, 2018). Laporan posisi keuangan membantu untuk memprediksi waktu, jumlah, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Banyak analis yang menggunakan laporan posisi keuangan dalam penilaian risiko suatu perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

Laporan posisi Keuangan terdiri dari tiga komponen yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan yang diharapkan menghasilkan pendapatan di masa depan melalui aktivitas operasi. Untuk membiayai aktivitas operasi, perusahaan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah pendanaan yang berasal dari kreditur dan merepresentasikan kewajiban perusahaan atau alternatif klaim aset kreditur (Subramanyam, 2014). Ekuitas yaitu sisa kepemilikan aset setelah dikurangi semua kewajiban (Kieso *et al.*, 2018). Ekuitas terdiri dari jumlah investasi atau kontribusi dana oleh pemilik dan akumulasi laba yang melebihi distribusi kepada pemilik (laba ditahan) sejak berdirinya perusahaan (Subramanyam, 2014).

2.3.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan Laba Rugi atau *Income Statement* mengukur performa keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau satu kuartal

(Subramanyam, 2014). Laporan laba rugi merepresentasikan aktivitas operasi perusahaan sepanjang periode. Selain itu, investor dan entitas bisnis menggunakan laporan laba rugi untuk menilai profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit (Kieso *et al.*, 2018). Komponen penting dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain adalah laba bersih dan penghasilan komprehensif lain. Laba bersih atau *net income* adalah jumlah yang didapat perusahaan selama periode tertentu. Sementara penghasilan komprehensif menggambarkan perubahan ekuitas pemegang saham sepanjang periode dari sumber non pemilik (Subramanyam, 2014).

2.4 Rasio Keuangan

2.4.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendek menggunakan aset lancar atau aset berkarakteristik mudah dikonversi ke kas (Drake & Fabozzi, 2010). Aset-aset yang mudah dikonversi menjadi kas ini disajikan di laporan keuangan sebagai aset lancar atau *current asset*. Aset lancar juga sering disebut sebagai *working capital* karena digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasi sehari-hari. Aset ini digunakan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Adapun rasio likuiditas yang dipakai pada pendekatan ini terdiri dari sebagai berikut.

a. *Current Ratio* atau Rasio Lancar

Penggunaan *current ratio* adalah untuk menilai berapa kali aset lancar dapat menutupi liabilitas jangka pendek. Rasio ini diperoleh dengan membagi jumlah keseluruhan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek perusahaan. Semakin besar

nilai rasio yang diperoleh mengindikasikan kemampuan perusahaan semakin baik dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya.

b. *Quick Ratio* atau Rasio Cepat

Quick ratio dan *current ratio* memiliki cara perhitungan yang hampir mirip, hanya saja pada *quick ratio* mengecualikan persediaan pada jumlah perhitungan aset lancar. Persediaan dikecualikan karena merupakan aset yang paling tidak likuid diantara aset lancar lainnya. *Quick ratio* didapat dengan terlebih dahulu mengurangi aset lancar dengan persediaan, kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek.

2.4.2 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi liabilitas keuangan jangka panjang (Subramanyam, 2014). Rasio solvabilitas yang digunakan pada analisis ini adalah sebagai berikut.

a. *Debt to Assets Ratio*

Debt to assets ratio mengindikasikan proporsi aset yang dibiayai dengan utang. Seluruh utang dimasukkan ke dalam perhitungan baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Semakin tinggi rasio menggambarkan semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk membiayai aset yang dimiliki perusahaan.

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio mengukur besarnya proporsi utang perusahaan untuk membiayai operasinya relatif dengan nilai buku ekuitas pemegang (Drake & Fabozzi, 2010). Semakin tinggi nilai rasio, maka jumlah utang perusahaan lebih

besar dari pada ekuitasnya dan sebagian besar aktivitas operasinya dibiayai dengan utang.

2.4.3 Rasio Profitabilitas

Rasio solvabilitas digunakan investor untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola biayanya (Drake & Fabozzi, 2010). Rasio solvabilitas yang digunakan dalam karya tulis ini meliputi.

a. *Return on Equity* (ROE)

Return on equity didapat dari hasil pembagian antara laba bersih atau *net income* dengan modal pemilik saham atau *shareholder's equity*. ROE merupakan indikator komprehensif untuk mengukur performa perusahaan karena dapat menilai kemampuan pengelolaan dana manajer dalam menghasilkan imbal hasil kepada pemegang saham (Palepu & Healy, 2013).

b. *Return on Asset* (ROA)

Return on asset merefleksikan banyaknya profit perusahaan untuk setiap rupiah aset yang diinvestasikan (Palepu & Healy, 2012). Rasio ini diperoleh dari perkalian antara margin laba bersih dan rasio perputaran aset. Margin laba bersih berasal dari pembagian laba bersih dengan penjualan, sedangkan rasio perputaran aset berasal dari hasil penjualan dibagi dengan total aset. Sehingga, *return on asset* diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total aset karena penjualannya sudah saling tereliminasi. Semakin tinggi nilai ROA mengindikasikan kemampuan perusahaan semakin baik dalam memanfaatkan asetnya untuk aktivitas operasi.